

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2017-2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dan realisasi pendapatan kabupaten kupang pemerintah daerah belum mampu dalam merealisasikan pendapatan daerah yang telah ditargetkan. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan yang ditargetkan lebih kecil dari realisasi anggaran pendapatan. Dimana pendapatan daerah kabupaten kupang tahun 2017-2021 dikategorikan pendapatannya kurang baik.
2. Target dan realisasi pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten kupang pemerintah daerah sudah mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya dikarenakan pemerintah daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu keperiode berikutnya.. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah menggali potensi daerah secara maksimal. Dimana pertumbuhan pendapatan asli daerah kabupaten kupang tahun 2017-2021 dikategorikan pertumbuhannya positif.

3. Target dan realisasi belanja daerah kabupaten kupang tahun anggaran 2017-2021 dapat dilihat bahwa dari belanja daerah sudah mampu mempertahankan dan meningkatkan anggaran belanja daerah dari tahun sebelumnya. Hal dikarenakan jumlah yang dianggarkan melebihi realisasi belanja sehingga kinerja keuangan belanja dikatakan baik. Dimana anggaran belanja daerah kabupaten kupang tahun 2017-2021 dikategorikan pendapatannya baik.

5.2 Implikasi Teoritis

Berikut ini dijelaskan implikasi teoritis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka dasar penelitian.

Teori Marchelino Daling tahun (2013), berjudul Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan hasil penelitian (1) kinerja pendapatan dari pemerintah kabupaten minahasa tenggara belum cukup baik, dapat dilihat dari pendapatan periode 2009-2011 yang belum mancapai target yang telah ditetapkan. PAD yang tidak signifikan menjadi salah satu faktor pendorong pendapatan yang kurang terealisasi dari yang telah dianggarkan. (2) kinerja belanja dari pemerinta kabupaten minahasa tenggara sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten minahasa tenggara sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya.

Teori Bahrhun Assidiqi tahun (2016), berjudul analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten klaten tahun 2008-2012. Dengan hasil penelitian. (1) Hasil Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien.(a) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Varians Pendapatan Daerah Pemkab Klaten selama Tahun 2008-2012, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi APBD Kabupaten Klaten sebesar 100,89%. (b) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemkab Klaten selama Tahun 2008-2012, secara umum mengalami peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan. Halini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 12,13%. (c) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Pemkab Klaten selama tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Kabupaten Klaten dapat dikatakan rendah dengan rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 5,03%. Dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Klaten selama 2008-2012 menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih tergantung kepada pemerintah pusat ditunjukkan dengan angka ketergantungan mencapai 90,44%. Tingkat efektifitas pajak daerah mencapai angka rata-rata 103,82%, sehingga dikatakan efektif. Rata-rata tingkat efisiensi pajak

daerah mencapai angka diatas 10%, sehingga penggunaan biaya pemungutan pajak dikatakan belum efisien. BUMD yang ada di Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten, ditunjukkan dengan Derajat Kontribusi BUMD yang setiap tahunnya lebih dari 0%. (2) Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal. (a) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Varians Belanja Daerah Pemkab Klaten selama tahun 2008-2012, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi APBD Kabupaten Klaten sebesar 93,48%. (b) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah Pemkab Klaten selama tahun 2008-2012, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu 11%. (c) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2008-2012 rata-rata Belanja Operasi sebesar 90,33% sedang Belanja Modal sebesar 9,57%. (d) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Klaten tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan efisiensi belanja.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat, saran tersebut sebagai berikut :

Bagi Pemerintah Daerah, dengan diketahuinya varians pendapatan daerah, varians belanja daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah di kabupaten kupang. Diharapkan agar pemerintah kabupaten kupang mampu mempertahankan atau meningkatkan pendapatan dari tahun sebelumnya. Dan juga harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang sudah ada, peningkatan PAD dilakukan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan secara sistematis untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan oleh aperator-aparatur daerah supaya pendapatan asli daerah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Peneliti selanjutnya, pemerintah kabupaten kupang harus ketat mempertimbangkan varians pendapatan yang terus ditingkatkan karena terbukti meningkatnya pendapatan asli daerah berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi demikian pula varians belanja daerah perlu ditingkatkan selalu karena juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten kupang.